

STRATEGI CALON LEGISLATIF KOTA PEKANBARU DALAM MERAIH SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Larshen Yunus NK Simamora
(yunuslarshen@yahoo.co.id)
Cellular Number : 0812 7774 3000
Supervisor: Dr. Achmad Hidir, M.Si

Department of Sociology, Faculty of Social Sciences Political Science - University of Riau
Campus Bina Widya, Km 12.5 Jalan Simpang HR Subrantas New, Panam, Pekanbaru-Riau

ABSTRACT

Post April 9, 2009 on previously scheduled to take place on April 5, 2009 agoconstituted a milestone in the political history of modern Indonesia in the context of the implementation of the General Legislative Elections with elected representatives of the people in this case to choose legislators Pekanbaru by using a majority vote system of election at this stage of the Open List Proportional system mechanisms that can provide the same opportunity for anyone who wants to become a legislator has completed the democratic system in the field of institutions - political institutions in Indonesia. In the case of urban society Pekanbaru faced with a choice to be able to determine simultaneously choose 45 members legislator second level of Pekanbaru City Council candidates are available as 618 participants competed the Legislative General Election. In the composition of the increasingly limited, the emotional sentiment - was in fact still a primordial reasons and motives in choosing a figure or figures someone who deserves to be served as a legislator. Seen with the effort as do various strategies held by the Legislative Candidates for their vote and win the competition Legislative General Election in Pekanbaru city in 2009. Strategies used include Door to Door Come to Every Home Community, Enabling More Success Team, Open Campaign and others - others. In general, 6 people of respondents a sample of researchers consisting of 2 persons from each party, candidate 1 wins and 1 defeat candidates from each party are available as three types of political parties.

In this study population is all Pekanbaru City Legislative Candidates who competed in the 2009 general election. Researchers used for the determination of respondent Quota Sampling. In order to determine who include members of the research sample should first determine the desired respondent. To know about ways and strategies used by the candidates, researchers looked at the status and background of each candidate. In this sampling investigators decide the number of samples per each - each stratum (membership type) tamap random. In this research, using qualitative research model description. The subjects of this study are candidates of Golkar Party with the principle of nationalism, the principle of Joint Democratic Nationalism - Religious and PDS with religious principle. Screening instrument data used is interviews, documentation and literature searches. The data analysis technique used is a qualitative description. The theory used for the formulation of strategy and motive problems in reaching sound Legislative Candidates in the General Election year 2009 is Theory of Action and the Theory of Social Action of the experts Sociology ie, Max Weber and Talcott Parsons.

Keywords: *Strategy, (in gaining a voice in the Legislature in 2009 General Election)*

BAB I Pendahuluan

1. Latar belakang

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2009 merupakan pondasi sejarah politik di Indonesia modern karena terpilihnya wakil rakyat yang didahului oleh anggota DPR, DPD, dan DPRD (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) menggunakan sistem pemilihan suara terbanyak dengan mekanisme sistem Proporsional Daftar Terbuka yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang Legislator telah menuntaskan sistem demokratisasi di bidang unsur lembaga politik di Indonesia. (Miriam Budiardjo, 2008 : 135). Zaman orde baru telah membuka dan menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa tindak pelanggaran terhadap demokrasi telah membawa kehancuran bagi konstelasi maupun stabilitas perpolitikan bangsa dan penderitaan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia telah menunjukkan kesepakatannya dalam hal melakukan demokrasi, yakni didalam melakukan proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat dalam melakukan hal tersebut dapat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat hidup dan ditegakkan dalam pengawasan terhadap lembaga eksekutif yang dilakukan oleh lembaga legislatif sebagai wadah perpanjang tangannya suara maupun aspirasi yang dimiliki oleh berbagai macam komponen - komponennya dalam kehidupan masyarakat (*Konstituen*). Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum (PEMILU) yang terjadwal dan berkala.

Pemilihan Umum merupakan langkah utama dalam menentukan pemimpin negara. Karena pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka Pemilihan Umum yang disingkat dengan

PEMILU hendaknya dilaksanakan di seluruh penjuru wilayah negara tersebut. Pada dasarnya, pemerintahan di Indonesia - India tidak jauh berbeda. Contohnya yaitu, sama-sama menggunakan tahap Pemilihan Umum sebagai cara memilih Anggota Legislatif, Presiden - Wakil Presiden. Namun, perbedaan di antara kedua negara ini sangat terlihat dari pelaksanaan, proses dan pengawasan Pemilihan Umum itu sendiri. Pemilihan Umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL). Sedangkan Partai Politik (PARPOL) adalah sekelompok warga Negara Republik Indonesia yang secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.

Pasca pada tanggal 09 April 2009 (yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 05 April 2009) yang lalu, Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Kota Pekanbaru telah melaksanakan Pemilihan Umum legislatif dengan menggunakan sistem Proporsional Daftar Terbuka yang kemenangan Calon Legislatif ditentukan oleh perolehan Suara Terbanyak bukan berdasarkan nomor urut yang ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Tingkat II (Kota Pekanbaru). Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap), dapat menggunakan hak pilihnya. Tentunya dengan harapan agar para wakil rakyat dapat mewakili aspirasi masyarakat. Dalam hal tersebut masyarakat kota Pekanbaru diperhadapkan pada suatu pilihan untuk dapat menentukan sekaligus memilih 45 (empat puluh lima) orang anggota legislatif tingkat II DPRD Kota Pekanbaru dari calon yang tersedia

sebanyak 618 (enam ratus delapan belas) orang peserta yang mengikuti kompetisi Pemilihan Umum Legislatif. Pemilihan Umum merupakan kunci utama dari sebuah negara yang demokratis, Pemilihan Umum adalah suatu acara dan hajatan yang melibatkan banyak orang, khususnya rakyat Indonesia didalam suatu wilayah tertentu. Salah satu esensi yang terpenting dalam demokrasi adalah dengan adanya lembaga institusi politik seperti halnya infrastruktur politik yang ruang lingkupnya terdapat partai politik sebagai pesertanya. masing – masing individu maupun Partai Politik (PARPOL) berusaha bersaing dan melancarkan strategi untuk dapat menang dalam kompetisi tersebut dan berhasil duduk di kursi parlemen, khususnya untuk duduk di kursi DPRD Tingkat II Kota Pekanbaru. Pada prinsipnya partai Politik merupakan suatu instrumen politik yang terpenting bagi arah jalan dan kesuksesan seseorang untuk dapat duduk di kursi parlemen sebagai wakil rakyat, dalam hal ini peneliti mengambil 3 jenis partai politik yang memiliki ideologi maupun azas yang berbeda-beda antara lain, Partai Karya dengan Ideologi Nasionalisnya, Partai Demokrat yang memiliki ideologi Nasionalis-Religiusnya serta Partai Damai Sejahtera yang memiliki ideologi Religiusnya dalam konteks berkiblat pada agama Nasrani. Seperti yang kita ketahui pelaksanaan Pemilihan Umum sebelum tahun 2009 yang lalu masih kental dengan sistem Proporsional semi Daftar terbuka, Namun semenjak peraturan tentang kompetisi Pemilihan Umum pada tahun 2009 tidak lagi menggunakan sistem seperti yang demikian, dikarenakan pada tahun tersebut kemenangan Para Calon Legislatif itu ditentukan dari Perolehan Jumlah Suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2009 yang lalu.

Didalam analisa yang telah dilakukan oleh para ahli sosiologi seperti *Talcott Parsons*, beliau menyatakan bahwa

tindakan sosial adalah suatu hal yang berhubungan dengan kenyataan sosial yang paling kecil dan fundamental. Komponen-komponen dasar dari tindakan adalah adanya suatu tujuan, alat-alat dan kondisi situasi yang maupun norma-norma tertentu. Hal tersebut akan dapat memberikan kontribusi yang membuat semua orang memiliki perbedaan dalam hal mencapai tujuannya. Sekaligus hal tersebut merupakan aspek yang terpenting dari segenap situasi yang bisa saja tidak dapat di kontrol oleh seseorang yang sedang melakukan tindakan yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut terkait dengan analisa yang telah dilakukan oleh para ahli sosiologi seperti, *Talcott Parsons*, menyatakan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap kalangan Calon Legislatif merupakan kenyataan sosial yang artinya adalah tindakan tersebut memiliki berbagai macam tujuan-tujuan tertentu yaitu menjadi seorang legislator anggota DPRD yang dalam hal ini adalah menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru, guna dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan politik yang terkait dengan pembuatan undang-undang (legislasi), penganggaran maupun pengawasan setiap anggaran serta pelaksanaan dari setiap kebijakan-kebijakan politik. Sudah seharusnya Partai Politik dapat mengakomodir setiap anggota maupun kadernya untuk dapat berjalan sinergis di dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan visi, misi dan tujuan Partai Politik tersebut. Pada dasarnya Demokrasi merupakan perwujudan dari sistem politik yang berupaya memberikan wadah yang seluas – luasnya kepada rakyat agar dapat ambil bagian dan turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah. Pesta demokrasi yang bernama PEMILU atau Pemilihan Umum memang merupakan ruang publik artifisial yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Namun, menurut ahli sosiologi, *Karl Marx*, seorang filsuf terkemuka asal Jerman, Pemilihan Umum

bukan hanya proses politik yang indah tetapi ada hal – hal yang penting. hal – hal yang tersirat yang cukup ironis. *Karl Marx* mengemukakan bahwa Pemilihan Umum adalah jalan satu – satunya dan kesempatan bagi masyarakat biasa untuk menjalankan perannya dalam kehidupan politik. Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu sudah menapaki piranti demokrasi, salah satunya dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala, kompetisi Pemilihan Umum yang tidak lagi dimaknai sebagai mobilisasi masa, tetapi justru dapat membuka pintu selebar – lebarnya bagi para pelaku politik yang menjalankannya.

Aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma norma mengarahkan dalam memilih alternatif cara dan alat dalam mencapai tujuan. Norma-norma tersebut tidak dapat menentukan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan ini oleh ahli sosiologi *Talcott Parsons* disebut sebagai **Voluntarisme**, yaitu kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan. Aktor menurut konsep voluntarisme adalah perilaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih alternatif tindakan, guna melakukan sesuatu hal yang dianggap sebagai bentuk dari setiap upaya-upaya yang dilakukan dalam konteks pemenuhan kebutuhan. **Tindakan Voluntaristik** menurut ahli sosiologi seperti *Talcott Parsons* mencakup elemen – elemen dasar sebagai berikut: (1) adanya pelaku yang terdapat didalam konsepsi *Parson* merupakan pelaku individual (pelaku perorangan) ; (2) yang diasumsikan sebagai pelaku perorangan tersebut adalah seseorang yang sedang mengejar tujuan (goal) ; (3) pelaku juga telah dianggap memiliki beberapa alternatif cara maupun alat yang digunakan untuk mencapai sasaran ataupun tujuannya; (4) pelaku juga dihadapkan

pada berbagai macam kondisi dan situasional, seperti pembentukan karakter ataupun biologis dan juga berbagai hambatan ekologi eksternal yang juga serta dapat mempengaruhi terhadap proses pemilihan alat untuk mencapai sasaran ataupun tujuan tersebut; (5) pelaku juga diatur oleh seperangkat nilai , norma dan ide – ide lainnya dimana ide – ide ini dapat mempengaruhi apa yang dianggap sebagai tujuan dan alat atau tentang cara apa yang dipilih untuk meraih tujuan tersebut sehingga tindakan “ **Voluntaristik** ” dengan demikian telah mencakup pembuatan keputusan subyektif tentang alat ataupun cara yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu ; dimana semuanya itu telah dipengaruhi oleh *value, norms, other idea*, dan kondisi maupun situasional tertentu (*Beilharz, 2003 : 292*). Berdasarkan penjelasan *Talcott Parsons* tersebut dapat digambarkan bahwa para Calon Legislatif Kota Pekanbaru memiliki niat dan tujuan yang menjurus kepada suatu hal yang berkaitan dengan kebutuhan sosial seperti penghargaan/ gengsi (*prestice*) dan juga kebutuhan ekonomi seperti penghasilan yang besar dalam menjalankan setiap kegiatan. Jadi, menurut analisa sosiolog *Talcott Parsons* diatas dapat dijelaskan bahwasanya tindakan seorang Calon Legislatif yang berupa cara maupun strategi untuk menjadi pemenang dan meraih suara terbanyak dalam kompetisi Pemilihan Umum Legislatif di Kota Pekanbaru Pada tahun 2009 yang lalu merupakan suatu hal yang berhubungan dengan tindakan manusia itu sendiri yang cenderung bersifat **Voluntaristik**, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma serta kenyataan sosial dimana tindakan yang dilakukan para

Calon Legislatif (CALEG) tersebut memiliki tujuan – tujuan tertentu yang paling utama adalah berhasil duduk menjadi seorang wakil rakyat (DPRD Tingkat II) di Kota Pekanbaru dari hasil Pemilihan Umum pada tahun 2009 yang lalu. Sehingga melihat dari latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Strategi yang dilakukan oleh para Calon Legislatif Kota Pekanbaru dalam meraih suara pada Pemilihan Umum tahun 2009 yang lalu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalaminya dengan mengambil judul: “ ***Strategi Calon Legislatif Kota Pekanbaru Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2009*** ”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncullah permasalahan. Adapun perumusan masalah yang akan dipelajari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Calon Legislatif (CALEG) Kota Pekanbaru dalam meraih suara pada Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2009.?”
2. Apa Motif Calon Legislatif (CALEG) menjadi Anggota DPRD Tingkat II Kota Pekanbaru.?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengupayakan mengetahui strategi yang digunakan oleh para Calon Legislatif Kota Pekanbaru dalam meraih suara supaya menjadi pemenang pada Pentas Kompetisi Pemilihan Umum (PEMILU) pada tahun 2009.
2. Untuk mengetahui motif CALEG yang ingin menjadi anggota DPRD tingkat II Kota Pekanbaru yang

mengikuti kompetisi Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2009.

1.3.2 Manfaat Penelitian :

Secara Akademis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi wawasan ilmu pengetahuan seseorang tentang kiat – kiat dan cara yang tepat untuk dapat menang dan duduk sebagai seorang wakil rakyat (Legislator).
2. Untuk mengetahui gambaran secara umum bagaimana pelaksanaan Pemilihan Umum calon anggota legislatif di tingkat II (kabupaten/kota) pada tahun 2009 yang lalu.
3. Berguna dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang ilmu sosiologi didalam pendekatannya yang menjurus kepada sosiologi politik.
4. Sebagai kontribusi ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis serta berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.
5. Sebagai referensi dan pembelajaran bagi peneliti untuk dapat mencapai cita – citanya sebagai seorang wakil rakyat.
6. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa/i jurusan sosiologi yang lebih menyukai pendekatannya dibidang sosiologi politik.
7. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi barometer dalam memberi inspirasi bagi kawan – kawan, kakanda, ayunda maupun adinda sekalian yang ingin meneliti permasalahan yang sama seperti pada hasil karya ilmiah yang telah peneliti lakukan.
8. Sebagai salah satu prasyarat kelulusan Strata- 1 guna meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Secara Praktis :

1. Sebagai bahan diskusi bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan sosiologi politik.
2. Untuk dapat memberikan pencerahan bagi peneliti yang mengkaji, membahas dan mempelajari ilmu sosiologi dibidang politik.
3. Sebagai bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

BAB II Tinjauan Pustaka

2.1 Tindakan Seseorang Dalam Berpolitik

Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang menerapkan sistem politik demokrasi. Demokrasi di Indonesia ini, mempunyai sebuah slogan yang cukup singkat, akan tetapi mempunyai makna yang cukup dalam. Slogan yang dimaksud adalah “ *dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat* ”. Bercermin dari slogan tersebut, dapatlah kita ketahui bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini adalah demokrasi keterwakilan, yang mana salah satu contoh pengejawantahan daripada tahap demokrasi ini adalah adanya pesta demokrasi, yaitu sistem demokrasi Pemilihan Umum (PEMILU).

Salah satu sistem Pemilihan Umum (PEMILU) yang krusial atau penting dalam ketatanegaraan Indonesia adalah Pemilihan Umum Legislatif yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen, yang biasa kita kenal dengan sebutan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (tingkat provinsi, kabupaten/ kota). Dalam Pemilihan Umum Legislatif ini, rakyat dapat mencalonkan dirinya untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian daripada itu, yang berperan dalam hal memilih, juga rakyat. Rakyatlah yang memilih para wakilnya yang akan duduk dalam parlemen. Setelah terpilih menjadi anggota parlemen, para konstituen tersebut pada hakikatnya adalah bekerja untuk rakyat secara menyeluruh. Itulah

yang dinamakan dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Didalam analisa yang telah dilakukan oleh para ahli sosiologi seperti *Talcott Parsons*, beliau menyatakan bahwa tindakan sosial adalah suatu hal yang berhubungan dengan kenyataan sosial yang paling kecil dan fundamental. Komponen-komponen dasar dari tindakan adalah adanya suatu tujuan, alat-alat dan kondisi situasi yang maupun norma-norma tertentu. Hal tersebut akan dapat memberikan kontribusi yang membuat semua orang memiliki perbedaan dalam hal mencapai tujuannya. Sekaligus hal tersebut merupakan aspek yang terpenting dari segenap situasi yang bisa saja tidak dapat di kontrol oleh seseorang yang sedang melakukan tindakan yang dimaksud. Kondisi ini menunjukkan tentang adanya bentuk orientasi subjektif yang dapat mengendalikan aktivitas kegiatan dari segala hal-hal yang terkait mengenai adanya pilihan-pilihan yang diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan standar normatif yang merupakan bahagian dari pengakuan bersama (*1986, 106 – 113*).

Berdasarkan hal tersebut terkait dengan analisa yang telah dilakukan oleh para ahli sosiologi seperti, *Talcott Parsons*, menyatakan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap kalangan Calon Legislatif merupakan kenyataan sosial yang artinya adalah tindakan tersebut memiliki berbagai macam tujuan-tujuan tertentu yaitu menjadi seorang legislator anggota DPRD yang dalam hal ini adalah menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru, guna dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan politik yang terkait dengan pembuatan undang-undang (legislasi), penganggaran maupun pengawasan setiap anggaran serta pelaksanaan dari setiap kebijakan-kebijakan politik. Sudah seharusnya Partai Politik dapat mengakomodir setiap anggota maupun kadernya untuk dapat berjalan sinergis di dalam setiap kegiatan

yang berhubungan dengan visi, misi dan tujuan Partai Politik tersebut.

Demokrasi merupakan perwujudan dari sistem politik yang berupaya memberikan wadah yang seluas – luasnya kepada rakyat agar dapat turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah. Pesta demokrasi yang bernama PEMILU atau Pemilihan Umum memang merupakan ruang publik artifisial yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Namun, menurut ahli sosiologi, *Karl Marx*, seorang filsuf terkemuka asal Jerman, Pemilihan Umum bukan hanya proses politik yang indah tetapi ada hal – hal yang penting. hal – hal yang tersirat yang cukup ironis. *Karl Marx* mengemukakan bahwa Pemilihan Umum adalah jalan satu – satunya dan kesempatan bagi masyarakat biasa untuk menjalankan perannya dalam kehidupan politik. Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu sudah menapaki piranti demokrasi, salah satunya dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala, kompetisi Pemilihan Umum yang tidak lagi dimaknai sebagai mobilisasi masa, tetapi justru dapat membuka pintu selebar – lebarnya bagi para pelaku politik yang menjalankannya. Karena memang setelah melewati dua kali Pemilihan Umum dimasa reformasi, bayang – bayang trend menyusutnya partisipasi politik didalam semangat konstelasi politik yang telah berjalan di dalam menjalankan segenap dinamika dari berbagai macam kehidupan politik. Dalam teori aksi yang diterangkan oleh konsepsi ahli sosiologi seperti yang dikemukakan *Talcott Parsons* tentang kesukarelaan (*Voluntarisme*). Beberapa asumsi fundamental dari teori aksi yang dijelaskan oleh *Hinkle* adalah sebagai berikut,

1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek.

2. Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, tindakan manusia bukan dengan tanpa tujuan.
3. Dalam bertindak manusia menggunakan upaya, cara, tehnik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya yang artinya tidak bersifat kondisional.
5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya pada kegiatan maupun aktivitas yang dijalankan.
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat tahap dalam hal pengambilan keputusan (*Ritzer, 2002: 46*).

Talcott Parsons sebagai tokoh teori aksi menginginkan pemisahan antara teori aksi dan aliran behaviorisme, karena menurutnya mempunyai konotasi yang berbeda. Menurut *Parsons* suatu teori yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan mengabaikan aspek subjektif tindakan manusia tidak termasuk kedalam teori aksi, sehubungan dengan itu *Parsons* menyusun skema unit unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Adanya individu sebagai aktor.
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan tersebut.
3. Aktor memiliki alternatif cara, alat serta tehnik untuk mempunyai tujuan.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakan dalam mencapai tujuan.
5. Aktor dibawah kendali dari nilai nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta

tindakan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (Ritzer, 2002:48-49).

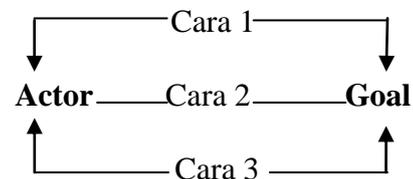
Berdasarkan mengenai penjelasan yang diutarakan *Talcott Parsons* tersebut dapat digambarkan bahwa para Calon Legislatif Kota Pekanbaru memiliki niat dan tujuan yang menjurus kepada suatu hal yang berkaitan dengan kebutuhan sosial seperti penghargaan/ gengsi (prestige) dan juga kebutuhan ekonomi seperti penghasilan yang besar dalam menjalankan setiap kegiatan. Jadi, menurut analisa sosiolog *Talcott Parsons* diatas dapat dijelaskan bahwasanya tindakan seorang Calon Legislatif yang berupa cara maupun strategi untuk menjadi pemenang dan meraih suara terbanyak dalam kompetisi Pemilihan Umum Legislatif di Kota Pekanbaru Pada tahun 2009 yang lalu merupakan suatu hal yang berhubungan dengan tindakan manusia itu sendiri yang cenderung bersifat **Voluntaristik**, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma serta kenyataan sosial dimana tindakan yang dilakukan para Calon Legislatif (CALEG) tersebut memiliki tujuan – tujuan tertentu yang paling utama adalah berhasil duduk menjadi seorang wakil rakyat (DPRD Tingkat II) di Kota Pekanbaru dari hasil Pemilihan Umum pada tahun 2009 yang lalu.

Strategi dapat diartikan sebagai suatu seni dengan menggunakan kekuatan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan yang paling efektif pada pencapaian -pencapaian terkait dengan tujuan yang dimiliki. Konsep Strategi yang juga dimiliki oleh Para Calon Legislatif dapat di definisikan sebagai suatu rencana yang cermat

mengenai adanya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara Harfiah konsep tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk kombinasi dari segelumit aktivitas dan pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya, agar upaya yang telah diharapkan dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidupnya. Strategi menurut perspektif *social action* atau teori aksi yang dipelopori oleh sosiolog *Max Webber* dan ahli sosiologi *Talcott Parsons* adalah Tindakan sosial yang dimaksud dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain demi terlaksananya maupun terwujudnya suatu tujuan yang ingin dicapai.

Berikut ini adalah gambaran bentuk dari proses-proses dan unsur yang terdapat pada konsep teori aksi yang dinyatakan oleh para ahli sosiologi seperti *Max Webber* dan *Talcott Parsons*.

Teori Social Action



Juga dapat berupa tindakan ”membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu, atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu, *Max Webber* mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yaitu :

- Tindakan manusia, yang menurut aktor mengandung makna yang subyektif. Ini meliputi tindakan nyata.
- Tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif.
- Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
- Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu (*Ritzer, 2002 : 38-39*).

Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, sosiolog *Max Weber* membedakan dalam empat tipe. Dimana semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami. Tipe tindakan tersebut antara lain adalah : *a. Zwerk rational*, Yaitu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. *b. Wrektrational action*, Dalam tindakan tipe ini, aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat atautkah lebih cepat untuk mencapai tujuan yang lain. Ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan kedua ini masih rasional meski tidak serasional yang pertama. Karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami. *c. Affectual action*, Tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami. Kurang atau tidak rasional. *d. Traditional action*, Tindakan yang

didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu saja (*Ritzer, 2002:40-41*). Paradigma definisi sosial memiliki 4 teori yang menjelaskan antara lain, yaitu Teori Aksi, Teori Simbolik, Fenomenologi dan teori pertukaran sosial. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya sendiri, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan.

BAB III Metode Penelitian

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti telah menentukan lokasi yang tepat yaitu peneliti mengambil lokasi di daerah Kota Pekanbaru sebagai daerah sasaran studi kasus dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang menjadi pusat segala aktivitas terutama dalam hal kajian tentang politik dan unsur mobilitas kehidupan yang memiliki frekuensi cukup tinggi. Peneliti dalam hal ini mengambil lokasi di Kantor DPRD tingkat II Kota Pekanbaru, Kantor KPUD Kota Pekanbaru, daerah Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki dan juga Kediaman seseorang Calon Legislatif yang menang dan Calon Legislatif yang tidak menang dalam mengikuti kompetisi Pemilihan Umum Legislatif tingkat II Kota Pekanbaru pada tahun 2009 yang lalu. Alasannya karena instansi dan tempat tersebut merupakan suatu hal yang tepat dalam konteks penyimpanan dokumen maupun berkas terkait Pemilihan Umum Legislatif tingkat II Kota Pekanbaru.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini menggunakan 6 (enam) orang responden dari 3 (tiga) unsur Partai Politik yang berbeda, yaitu antara lain adalah dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan ideologi Nasionalismenya dan Sejarah maupun pengalamannya dalam

mengikuti pentas perpolitikan di republik ini, Partai Demokrat sebagai Partai Penguasa saat ini yang memiliki ideologi Nasionalis – Religius dan berikutnya adalah dari Partai Damai Sejahtera sebagai golongan Partai kelompok tertentu yang memiliki ideologi Religius yang pada saat itu mampu merebut kursi sekaligus memiliki fraksi di tingkat Parlemen Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam Penelitian ini Populasi adalah seluruh Calon Legislatif Kota Pekanbaru yang berkompetisi pada Pemilihan Umum tahun 2009. Untuk penetapan responden peneliti menggunakan Quota Sampling. Agar dapat menentukan siapa saja yang termasuk anggota sampel peneliti dan peneliti harus terlebih dahulu mengetahui responden yang diinginkan. Untuk mengetahui tentang cara dan strategi yang digunakan oleh para Calon Legislatif Kota Pekanbaru maka peneliti melihat status dan latar belakang dari masing – masing calon. Dalam hal ini selain calon yang berhasil, responden peneliti juga terdiri dari unsur – unsur Calon Legislatif yang pada saat itu tidak berhasil meraih suara ataupun kalah dalam kompetisi Pemilihan Umum (PEMILU) Pada tahun 2009 yang lalu, yang terdiri dari masing – masing partai yang memiliki ideologi yang berbeda beda. Gambaran umum tentang profil responden penulis klasifikasikan berdasarkan Nama yang di barengi dengan Umur, Latar belakang pekerjaan, Jenjang tingkat pendidikan, Status sosial dan juga Status keanggotaannya dalam dinamika kehidupan Partai Politik (PARPOL). Dalam pengambilan sampel ini peneliti mengupayakan untuk dapat menentukan sendiri jumlah sampel per tiap – tiap strata (jenis keanggotaan) tamap random. Untuk itu peneliti sengaja mengambil sampel dari masing – masing partai. Pembagiannya 2 (dua) responden dari masing – masing partai, 1 (satu) orang yang sukses dan berhasil duduk di kursi parlemen DPRD Kota Pekanbaru, 1 (satu) orang lagi yang tidak berhasil atau

yang gagal dalam mengikuti kompetisi Pemilihan Umum pada tahun 2009 yang lalu. Selain itu peneliti juga berusaha mengambil setiap informasi yang penting terkait mengenai identitas dan latar belakang dari masing – masing Calon Legislatif (CALEG) dengan menggunakan Key Informan yaitu para Elit Partai Politik yang menjadi sasaran studi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang umumnya di pakai oleh para peneliti yang lainnya, antara lain adalah

a. *Interview/Wawancara*

Merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti agar dapat berdialog langsung dengan responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Wawancara mendalam, terpimpin yang juga bersifat terstruktur dimana peneliti harus mampu bertanya sebanyak – banyaknya, sedalam – dalamnya kepada responden dan membiarkan sekaligus membebaskan responden untuk berbicara sesuai dengan pengalamannya, wawasan pengetahuannya dan pandangan pribadi maupun perspektif yang dimilikinya terkait mengenai persoalan yang dimaksud. Teknik ini digunakan untuk dapat memperoleh informasi yang akurat, tajam dan terpercaya yang berupa data diri responden maupun data-data yang tidak mungkin terungkap hanya karena melalui angket. Dengan menggunakan teknik ini peneliti juga dapat menggali informasi yang mungkin diperoleh dari responden. Diharapkan dengan teknik ini peneliti juga akan mendapatkan kevalidtan segala komunikasi sekaligus informasi yang turut serta dapat dipertanggungjawabkan selain itu juga pada prinsipnya metode wawancara mendalam (*indept interview*) adalah suatu metode penelitian yang bisa digunakan untuk menggali informasi tentang peta politik melalui wawancara dengan orang-orang tertentu yang

dianggap kompeten atau mengerti terhadap isu dan persoalan tertentu secara luas dan mendalam. Cara kerja wawancara mendalam ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh seorang wartawan. Dalam hal ini peneliti yang ditunjuk oleh kandidat melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dianggap menguasai tentang isu atau permasalahan tertentu. Misalnya wawancara dengan wartawan lokal mengenai media komunikasi yang efektif digunakan oleh masyarakat, wawancara dengan akademisi kampus tentang masalah sosial dan solusinya, dan wawancara dengan tokoh partai politik untuk menggali peta politik elit lokal. Hasil wawancara ini kemudian dibuat deskripsi tentang berbagai isu dan solusi yang diharapkan. Dengan membaca hasil wawancara mendalam kandidat bisa mendapat gambaran yang luas dan mendalam tentang berbagai isu dan persoalan di daerah pemilihan yang dimaksud tersebut. Hasil wawancara ini juga bisa menjadi referensi sekaligus bahan-bahan bagi kandidat untuk menyusun visi dan misi. Kekurangan wawancara mendalam adalah metode ini tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya pengukuran, seperti mengukur tingkat dukungan, tingkat popularitas, tingkat persetujuan dan ketidaksetujuan.

b. Dokumentasi

Yaitu perolehan data-data dan referensi tentang cara penggunaan informasi sumber data dengan upaya mengumpulkan segala macam informasi yang berupa dokumen – dokumen dan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian ini yang peneliti dapatkan dari kantor KPUD Kota Pekanbaru, Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Pekanbaru (DPD P. GOLKAR), Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC P. Demokrat Kota Pekanbaru), dan kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC PDS) Kota Pekanbaru.

Penelusuran Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk dapat memperoleh literatur dan semacam tulisan yang berkaitan dengan segala persoalan yang diteliti guna menghindari kesalahan – kesalahan di dalam pelaksanaan dan penyajian data-data hasil dari penelitian tersebut.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru adalah kota terbesar di wilayah ibukota Provinsi Riau, Republik Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat frekuensi pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara (BANDARA) internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan terminal bus, Terminal Antar Kota Antar Provinsi, Antar Kota Dalam Provinsi Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS - AKAP dan AKDP), serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelabuhan Pelita Pantai dan Pelabuhan Sungai Duku. Dimasa silam kota ini hanyalah berupa dusun kecil yang bernama dusun payung sekaki yang domisilinya terletak di daerah pinggiran sungai siak. Dusun sederhana ini kemudian lambat laun dikenal juga dengan istilah dan sebutan dusun senapelan. Dengan mulai berjalannya waktu dusun inipun mulai berkembang pesat, terlebih setelah lokasi pasar yang biasa disebut dengan istilah pekan lama pindah keseberang tepatnya pada tanggal 23 Juni 1784.

Kota Pekanbaru di Prediksi menjadi kota jasa yang konsekuensinya adalah kota tersebut harus tetap dan terus dibanahi dengan meningkatkan fasilitas penunjang perkotaan. Saat ini, ibukota Provinsi Riau ini telah serta memiliki berbagai fasilitas penunjang yang cukup komplit. Selain perusahaan jasa adapula

perusahaan – perusahaan seperti perbankan, asuransi, perusahaan perdagangan valuta asing, serta jasa industri lainnya, banyak pula perusahaan besar yang membuka kantor pusat dan kantor cabang di kota pekanbaru ini, semua ini adalah salah satu dari bahagian faktor pendukung misi dari daerah yang disebut sebagai kota jasa (*Kompas, 2003 : 143*). Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang, (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, KEPRI). Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang Wali Kota. Efektifitas pemerintahan kota di Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada 9 November 1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai wali kota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri.

Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan munculnya hegemoni satu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A. sebagai wali kota sampai tanggal 10 Desember 1970, dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid, yang memerintah lebih dari 10 tahun. Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penertiban periode pemerintahan kota, dan pada 5 Juli 1981, terpilih Ibrahim Arsyad, S.H., pada 21 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada 22 Juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H., memerintah selama dua periode. Adapun dari hasil PEMILU Legislatif 2009, jumlah anggota DPRD kota Pekanbaru adalah sebesar 45 orang, yang tersusun atas perwakilan dari 12 Partai Politik. Selanjutnya penelitian ini juga dilakukan di dua wilayah Kecamatan yang berbeda antara lain adalah Kecamatan Tampan sebagai Salah Satu Kecamatan yang maju dari segi aspek pendidikan dan Terpadat dari segi Jumlah Penduduk Maupun Luas Wilayah dari Kecamatan – Kecamatan yang ada di Daerah Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan merupakan pusat dari segala aktivitas kehidupan masyarakat kota Pekanbaru dan Provinsi Riau, yaitu sebagai pusat pendidikan, pusat perekonomian dan juga pusat perindustrian. Yang kedua adalah Kecamatan Payung Sekaki yang secara Geografis juga merupakan kawasan yang sangat strategis sebagai bentuk dari pusat kawasan-kawasan bisnis, diantaranya di Kecamatan ini terdapat Terminal AKAP (Antar Kota Antar Provinsi), Mall serta juga terdapat deretan-deretan Pertokoan. Apabila dilihat dari luas wilayah yang belum tersentuh pembangunannya, maka Kecamatan Payung Sekaki adalah juga

termasuk wilayah arah perluasan pembangunan tata ruang Kota Pekanbaru. Sehingga sangat potensial guna menarik minat para investor yang hendak menanamkan Investasinya di kawasan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tersebut. Kecamatan Payung Sekaki terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Rukun Warga (RW) dan 164 (seratus enam puluh empat) Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 15.601

BAB V Tindakan Seseorang Dalam Berpolitik

5.1 Strategi Calon Legislatif Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Umum

5.1.1 Kampanye Terbuka

1. Sosialisasi di atas Pentas dengan tambahan adanya kegiatan hiburan musik, tari dll.

2. Sosialisasi memanfaatkan media cetak maupun media elektronik.

3. Sosialisasi dengan menggunakan metode menyebarkan kertas ajakan terkait dengan visi, misi dan tujuan maupun keinginan dari Calon Legislatif tersebut.

4. Sosialisasi dengan menggunakan metode Dialog Publik kepada elemen masyarakat.

5. Sosialisasi dengan mengadakan kegiatan sosial seperti, BakSos, Seni dan Olahraga.

5.1.2 Kampanye Tertutup

1. Komunikasi secara persuasif (*dor to dor*) mendatangi rumah masyarakat, bersilatullah seraya menyampaikan tujuan & keinginan dari Calon Legislatif tsb.

2. Komunikasi serangan fajar, kegiatan yang dilakukan sebelum hari H pencoblosan. Diantaranya membagikan amplop yang berisi uang, membagikan sembako dll.

3. Komunikasi dalam aspek Primordialisme, upaya yang dilakukan antar Calon Legislatif dengan orang-orang yang termasuk keluarga, saudara dan kerabat baik maupun dengan atas kesamaan agama, suku, ras, budaya serta kampung halaman.

5.2 Motif Seseorang Yang Menjadi Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum

a. Kebutuhan Finansial (Pendapatan)

b. Kebutuhan Prestise (Penghargaan)

c. Kebutuhan Afiliasidan

Knowledge (Hubungan Sosial dan Pengetahuan)

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Salah satu aspek terkait dengan terlibatnya seseorang didalam aktivitas yang berhubungan dengan nuansa politik adalah dengan cara aktif dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan partai politik. Dengan demikian keaktifan seseorang tersebut bisa dikatakan sebagai suatu tindakan sosial yang berkecimpung di dalam dunia politik. Tindakan tersebut tidak terlepas dengan alasan – alasan tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang tersebut untuk memberikan dan Memberanikan diri menjadi Calon Legislatif (CALEG). Alasan ini bisa dikatakan sebagai unsur – unsur yang bersifat Motifasi / Motif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh para Calon Legislatif Kota Pekanbaru Daerah Pemilihan IV, Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki Pada Kompetisi Pemilihan Umum Tahun 2009 yang lalu.

Pelaksanaan Strategi yang dilakukan oleh para Calon Legislatif tersebut merupakan suatu program strategi

yang diupayakan dapat menarik simpatik masyarakat Kota Pekanbaru khususnya yang berdomisili di daerah Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki. Didalam menjalankan program – programnya, para Calon Legislatif (CALEG) melakukan aktivitas dan kegiatan – kegiatan yang bersifat langsung/ konkrit terkena langsung oleh para masyarakat yang berdomisili di wilayah dua kecamatan tersebut. Kegiatan yang bersifat langsung diantaranya adalah melakukan aktivitas berkunjung langsung kerumah masyarakat sebagai ajang silaturahmi antar umat, melakukan suatu kegiatan tertentu misalnya adalah melakukan kegiatan pasar murah, membuat spanduk untuk toko ataupun kedai harian yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, langsung mendatangi rumah warga/ ketok pintu guna menyampaikan visi, misi dan tujuan terkait niat para Calon Legislatif tersebut kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki, melaksanakan kegiatan Bakti Sosial (BakSos), Fogging, Pengobatan Gratis dan hal – hal kegiatan yang terkait menjurus langsung dengan kebutuhan masyarakat secara umum. adapun yang akan menjadi target bagi para Calon Legislatif tersebut diantaranya adalah Tokoh Masyarakat, RT, RW, Lurah, Camat, Ketua Tokoh Paguyuban suku, agama dan lain-lain.

6.2 Saran

Sebagai suatu hal yang menjadi bentuk keluaran dan hasil dari penelitian ini, Peneliti memberikan beberapa saran yang baik bagi para peneliti yang akan meneliti persoalan - persoalan yang sama dikemudian harinya dan kepada pihak-pihak lainnya yang mencoba untuk mengkaji dan meneliti penelitian ini kedepannya. Adapun bentuk saran yang akan peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya setiap Calon Legislatif dapat lebih mengenal kondisi dan situasi Daerah Pemilihannya (DAPIL), agar suatu

saat, dapat dengan mudah mengalokasinya bantuan-bantuanterkaitdengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tempatan tersebut.

2. Diharapkan bagi para Calon Legislatif, agar dapat bijaksana dalam memberikan bantuan kepada masing – masing Daerah, agar tidak terjadinya konflik kecemburuan sosial antar masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang menjadi konstituen CALEG tersebut.

3. Para Calon Legislatif diharuskan dapat melaksanakan proses sosialisasi secara merata guna mewujudkan partisipasi aktif dan menjaring masyarakat sebagai suara pemilih bagi para Calon Legislatif tersebut.

4. Hakikatnya segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan – kegiatan sosialisasi pemilih bagi para Calon Legislatif didukung oleh Komunikasi yang baik terhadap masyarakat, bantuan dana maupun aktif terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, sebagai ajang pengenalan diri bagi si Calon Legislatif tersebut.

5. Penelitian ini sangat diharapkan dalam memberikan pengalaman yang bersifat Eksperimental bagi para peneliti berikutnya, terutama bagi para peneliti yang mengambil disiplin ilmu sosiologi pada Fakultas ilmu sosial ilmu politik, namun lain daripada itu , diharapkan langkah – langkah kedepannya untuk dapat menyempurnakan hasil dari format maupun data penelitian ini, dengan cara melibatkan informan –

informan dalam wilayah cakupan penelitian yang lebih luas dan lebih Representatif.

DAFTAR PUSTAKA

Althoff, Philip dan Rush, Michael, 1986. Pengantar Sosiologi Politik, CV. Rajawali, Jakarta.

Bagja Waluya. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, PT Grafindo Media Pratama.

- Bimo, Walgito. 2003. *Sosiologi Politik*. Yayasan Kampusiana, Surabaya.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Utama, JKT
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru Periode 2009 – 2014*, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru (DPRD Kota Pekanbaru).
- Dhakkidae, Daniel. 1985. *Partai Politik dan Sistem Kepartaian Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Doyle Paul Johnson; Robert M.Z. Lawang. *Teori Sosiologi : Klasik dan Modern*, 1988, Jakarta, PT. Gramedia.
- Gereungan, WA. 1987. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. PT Eresco. Jakarta.
- Gunarsih, Singgih D. 1975. *Pengantar Psikologi*. PT Rhineka Cipta. Bandung.
- Haryono, 1991. *Partai-Partai Politik Suatu Pengantar*, Jakarta.
- Horton, B. Paul. 1984. *Sosiologi Jilid 2*. Erlangga, Jakarta.
- Hungtington, P Samuel dan John Nelson diterjemahkan oleh Sahat Simamora. 1994.
- Joeniarto. 1982. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru*, Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru (KPU Kota Pekanbaru).
- Liddle, R. William, 1992, *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia Pada Awal Orde Baru*, Grafiti, Jakarta.
- Makka, A. Makmur, (eds), *Demokratisasi Tak Boleh Henti*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Nursal, Adman, *Political Marketing Strategi Memenangkan Sebuah PEMILU*.
- Nurtjahjo, Hendra, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, PT Rhineka Cipta, Jakarta.
- Paul, Johnson D. 1998. *Teori Sosiologi Modern I*. PT Gramedia, Jakarta.
- Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, PT Gramedia, Jakarta, 2004.
- Rahman, Arifin, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya, 2002.
- Rush, Michael, dan Philip, Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rizal Mallarangeng, *Mendobrak sentralisme ekonomi: Indonesia, 1986-1992*. (Kepustakaan Populer Gramedia, 2002).
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Sanit, Arbi, (eds), *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Sanit, Arbi, 1998, *Reformasi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saragih, Bintan R., *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Schroder, Peter, *Strategi Politik*, Friedrich Naumann Stiftung, Jakarta, 2003.
- Scott Last, *Pustaka Filsafat SOSIOLOGI POST MODERNISME*, Penerbit: Kanisius.
- Sjamsudin, Nazaruddin, Hamid, Zulkifli, dan Pribadi, Toto, *Sistem Politik Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1986.
- Soejono, Soekanto. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajawali, Jakarta.
- SP. Vlurman, 1987, *Teori Politik Modern*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Strategi Politik dan Penerapannya*. 2002; Bagian I dari III “Persiapan